

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara mempunyai suatu pemerintah yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah melaksanakan amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintahan memiliki kewenangan memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintah ditingkat pusat maupun daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana umum yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah merambah hampir keseluruhan aspek kehidupan. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan dari yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. Terjadi perubahan terhadap manajemen keuangan daerah. Paling tidak ada dua alasan mengapa perubahan di bidang ini diperlukan, antara lain: 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. (Gustika, 2009)

Penentuan tujuan adalah proses menentukan tingkat peforma yang spesifik untuk dicapai oleh karyawan. Ide dasar teori penentuan tujuan ini adalah bahwa tujuan/sasaran berfungsi sebagai motivator, yang menyebabkan orang-orang membandingkan kapasitas mereka saat ini yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan/sasaran. Menurut teori penentuan tujuan/*goal setting theory* bahwa tujuan-tujuan yang spesifik dan sulit, dengan umpan balik, akan menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Artinya bahwa tujuan yang spesifik akan meningkatkan kinerja, tujuan yang sulit, ketika diterima, akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah, dan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tanpa umpan balik (Sunyoto dan Burhanuddin, 2011:34).

Kinerja di dalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut, baik pimpinan maupun pekerja (Wibowo, 2012:79). Tugas dari pekerja dalam hal ini adalah untuk mencapai sasaran organisasi sedangkan tugas seorang pimpinan menjadi lebih kompleks karena harus melakukan beberapa fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara

negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja instansi. Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan. (Putri, 2010)

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauhmana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Apabila setiap pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaik baik masyarakat, maka tentunya kinerja sektor publik akan meningkat (Mahmudi, 2010:25). Komitmen yang tinggi menjadi individu lebih memperhatikan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, komitmen organisasi merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong para manajer bawahan berusaha keras mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. (Sumarno, 2005)

Adapun Dalam rangka memahami penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pihak kementrian/instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif, perlu memahami konsep pengendalian intern antara manajemen, staf, internal auditor dan eksternal auditor. Hal tersebut perlu diperhatikan karena sesuai dengan amanah pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun

2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dinyatakan: untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan atas kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Oleh karena itu diharapkan dengan system pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah ini dimaksudkan agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Rosdiana, 2010)

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita abaikan jika berbicara tentang kinerja instansi di pemerintahan adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah, selanjutnya disebut SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) secara dini. SPIP akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang oleh manajemen organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan bersangkutan. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah perlu diciptakannya sistem

pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Natalia, 2010)

Fenomena yang terjadi tentang kinerja instansi di Pemerintah Kota Bandung tahun 2013 telah mendapatkan fakta dimana kinerja dinilai kurang baik. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Haneda Tri Lastoto memaparkan 18 SKPD di Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori zona merah, 11 SKPD masuk dalam zona kuning dan hanya satu SKPD saja yang masuk dalam predikat zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. (<http://bandung.bisnis.com/>)

Adanya permasalahan terhadap 18 SKPD ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung dianggap tidak terlaksana dengan baik. Sehingga hal ini menyebabkan harus adanya pemetaan terhadap faktor yang menyebabkan tidak baiknya kinerja SKPD. Penulis dalam hal ini memandang bahwa komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjadi dua hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait hubungannya terhadap kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Adapun Fenomena yang terjadi tentang kinerja instansi pada pemerintah daerah yaitu Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Karimun menilai, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat buruk. Penilaian ini terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun 2014 oleh Bupati

Karimun Nurdin Basirun di gedung DPRD Jumat (13/12). Fraksi PDI misalnya, menyoroti anggaran APBD Karimun 2014 lebih besar tersedot untuk Dinas Pendidikan yakni sebesar Rp650 miliar dari Rp1,077 triliun total APBD 2014. Parahnya, anggaran sebesar itu tidak sebanding dengan pelayanan yang dilakukan guru di sekolah. "Guru lebih banyak menumpuk di Pulau Karimun, sementara di daerah hinterland masih kekurangan guru," kata Ketua Fraksi PDIP, untuk itu Jamaluddin, dirinya meminta kepada Bupati Nurdin agar memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan menginstruksikan agar guru-guru yang banyak menumpuk di Pulau Karimun dipindah tugaskan ke daerah hinterland. (<http://www.haluankepri.com/karimun/>)

Selain teori tersebut, Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Gustika Yollanda Putri (2013) mengenai "Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Manajerial SKPD". Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya ialah pertama, lokasi penelitian, peneliti sebelumnya melakukan penelitian yaitu pada SKPD Kota Solo sedangkan penelitian ini pada Dinas Pemerintah Kota Bandung. Kedua, penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen Kinerja Manajerial sedangkan penulis menggunakan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Penelitian mengenai Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan oleh Irene Chyntia, (2014) dengan judul "Pengaruh Pemanfaat Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya penelitian mengenai topik Kinerja Instansi Pemerintah juga dilakukan oleh Nasir Azwir (2013) yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Solok.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan di dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Survey pada SKPD Dinas Pemerintah Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Komitmen Organisasi pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh Komitmen Organisasi

dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Komitmen Organisasi pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi sektor publik.
 - c. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak – pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Komitmen Organisasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Komitmen Organisasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Kota Bandung.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam pengorganisasian kinerja Instansi Pemerintah Daerah kota Bandung.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awam mengenai pengaruh Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan Komitmen Organisasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Pemerintah Kota Bandung. Serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Komitmen Organisasi, Penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada tujuh belas Dinas di Pemerintah Kota Bandung, yaitu:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Kebudayaan
8. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
9. Dinas Bina Marga dan Pengairan
10. Dinas Pemakaman dan Pertamanan
11. Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran
12. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
13. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

14. Dinas Pelayanan Pajak

15. Dinas Komunikasi dan Informasi

16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

17. Dinas Pemuda dan Olahraga

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan dari waktu yang telah ditetapkan.